



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

# Pengelola Pantai Laguna Tertutup, PAD Rp18,5 Juta

## Jumlah Pengunjung Tembus 15 Ribu

**BINTUHAN** - Pengunjung Pantai Laguna ketika libur lebaran lalu membludak. Diperkirakan mencapai Rp 18,5 juta.

Anehnya, pengelola Pantai Laguna setor retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 18,5 juta.

Padahal jika dikalikan jumlah pengunjung dengan tiket masuk setiap orangnya Rp15 ribu di hari pertama dan Rp 10 ribu di hari kedua, pendapatan pihak pengelola Pantai Laguna diperkirakan mencapai Rp 150 juta.

Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Seperti apa sebenarnya sistem pengelolaan Pantai Laguna yang telah diserahkan ke pihak ketiga tersebut.

Dinas Pariwisata (Dispar) Kaur dikonfirmasi terkait kejelasan setoran PAD dari Pantai Laguna mengaku hanya menerima jumlah bersihnya saja.

Karena setoran retribusi PAD yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur itu sudah dipotong dengan berbagai biaya pengelolaan oleh pihak ketiga.

Termasuk gaji karyawan, keamanan,

biaya kebersihan dan lain-lainnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Marinda, S.Pi, M.Ling mengatakan mereka belum mendapatkan rincian jumlah pendapatan serta pengeluaran oleh pihak ketiga pengelola Pantai Laguna.

“Kita hanya menerima bersihnya saja, untuk biaya pengeluaran kita tidak tahu mereka tertutup,” ujarnya.

Dijelaskannya, pembayaran retribusi PAD dari Pantai Laguna itu sendiri untuk Pemkab Kaur adalah sebanyak 30 persen setelah dipotong biaya pengeluaran oleh pihak ketiga. Makanya saat setoran beberapa waktu yang lalu didapatkan hanya Rp 18,5 juta saja padahal jumlah pengunjung tembus sampai 15 ribu orang.

“Pihak pengelola juga enggan memberikan rincian pengeluaran mereka, karena memang setelah di pihak ketiga semuanya menjadi tanggung jawab mereka,” jelas Marinda.

Marinda mengungkapkan jumlah setoran PAD dari Pantai Laguna di libur lebaran tahun 2024 ini memang lebih besar dibandingkan tahun 2023 yang lalu.

Pihak pengelola waktu itu hanya memberikan setoran sebesar Rp 16 juta. Artinya di tahun ini, pengunjung pantai Laguna lebih banyak dibandingkan tahun lalu.

Ditambahkan Marinda, selain Pantai Laguna Pemkab Kaur juga memungut retribusi untuk PAD dari 2 destinasi lainnya.

Masing-masing Pantai Wehawang, dan Danau Kembar. Di tahun ini 2 destinasi wisata ini hanya mampu memberikan PAD sebesar Rp 3 juta kepada Pemkab Kaur.

“Semuanya telah menyetorkan uangnya beberapa waktu yang lalu,” sampai Marinda.

Sementara untuk tahun 2023 yang lalu PAD dari sektor pariwisata memang tidak mencapai target. Realisasi target hanya 56 persen atau sekitar Rp 41 juta lebih.

Marinda beralasan tak tercapainya target karena pengunjung wisata tidak terlalu ramai seperti tahun-tahun sebelumnya.

Untuk itu di tahun 2024 ini, Dispar Kaur akan melakukan upaya yang lebih maksimal demi mencapai target PAD.

Selain itu diakui Marinda, tak tercapainya target PAD pariwisata pada tahun 2023 juga diduga adanya kebocoran. Sebab, pengelolaan mengenai wisata tersebut berbeda dengan tahun 2022 yang lalu.

Dimana tahun-tahun tersebut, pembuatan tiket atau karcis untuk masuk ke lokasi wisata langsung dilakukan Dispar.

Sedangkan di tahun 2023, seluruh

tiket dikeluarkan oleh pihak pengelola objek wisata.

“Kalau tahun sebelumnya, memang Dispar yang mengeluarkan. Namun untuk tahun 2023, semuanya dikeluarkan oleh pihak pengelola,” terang Marinda.

Marinda mengungkapkan, karena karcis tersebut yang mengeluarkan adalah pihak pengelola, maka pengawasan dari pihak Dispar terbatas.

Maka dari itu sangat ada potensi kebocoran PAD dari sektor pariwisata tersebut.

Terbukti pada lebaran tahun 2023, setoran PAD dari tiga destinasi wisata tersebut merosot.

Pantai Laguna hanya menyetorkan Rp 16 juta di hari Raya Idul Fitri 2023 padahal di tahun 2022 yang lalu Pantai Laguna memberikan setoran Rp 20 juta lebih.

“Cukup banyak menurun, pengawasan terus kita lakukan tapi terbatas. Soalnya, tiket masuknya memang pihak pengelola sendiri yang mengeluarkan. Jadi kita tidak tau pasti, jumlah tiket tersebut,” ungkap Marinda.

Ditambahkannya, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang telah dibuat tentang pemungutan PAD dari tiga destinasi wisata tersebut, 30 persen dari penghasilan wisata wajib dibayarkan untuk PAD.